

PEMIKIRAN ISLAM TENTANG KEADILAN DAN PENGAWASAN PEMILU: MENGUATKAN KESADARAN POLITIK PEMILIH PEMULA

Ari Hasan Ansori

Pusat Kajian Pemilu dan Pemerintahan Lokal (PKP2L)
cep.arie@gmail.com

Lina Herlina

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang
linaherlina050488@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman tentang keadilan dalam Islam terhadap kesadaran politik pemilih pemula di Indonesia, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, serta bagaimana pengawasan pemilu dapat memperkuat partisipasi politik Pemilih Pemula. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran politik di kalangan pemilih pemula, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab politik Pemilih Pemula dalam proses demokrasi. Selain itu, kelemahan pengawasan pemilu/pilkada yang kurang atau tidak melibatkan pemilih pemula turut menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial, dianggap sebagai solusi potensial untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei yang melibatkan 300 responden pemilih pemula berusia 17 hingga 25 tahun, yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Data yang diperoleh dianalisis dengan regresi berganda untuk menguji hubungan antara pemahaman tentang keadilan dalam Islam, efektivitas pengawasan pemilu, dan kesadaran politik pemilih pemula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip keadilan dalam Islam secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran politik dan partisipasi aktif pemilih pemula dalam proses pengawasan pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perancangan program pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai keadilan dalam Islam, serta memperkuat peran pemilih pemula dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: *Keadilan, Pengawasan Pemilu, Kesadaran Politik, Pemilih Pemula, Pendidikan Politik.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Indonesia merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari Pemilih Pemula. Dalam konteks ini, pemilih pemula sebagai

pemilih yang memberikan suara untuk pertama kalinya—memegang peranan krusial dalam menentukan hasil pemilu. Data Komisi Pemilihan Umum (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 30% dari total pemilih pada pemilu sebelumnya

terdiri dari pemilih pemula.¹ Meskipun kontribusi Pemilih Pemula signifikan, banyak pemilih pemula yang tidak sepenuhnya memahami hak dan tanggung jawab Pemilih Pemula dalam proses pemilu, yang dapat berdampak pada kualitas keputusan politik yang diambil.

Kesenjangan pengetahuan di kalangan pemilih pemula sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi yang memadai tentang hak dan kewajiban Pemilih Pemula. Menurut Yunus, et al. (2022), banyak pemilih pemula yang tidak mendapatkan pendidikan politik yang cukup, baik di sekolah maupun dari lingkungan sosial Pemilih Pemula.² Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan apatis terhadap proses demokrasi, sehingga mengurangi partisipasi Pemilih Pemula dalam pemilu. Kesenjangan ini menciptakan ruang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat, yang selanjutnya dapat memengaruhi keputusan pemilih.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi politik telah meluncurkan program pendidikan politik yang ditujukan

khusus untuk pemilih pemula. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pemilih Pemula tentang proses pemilu, termasuk hak dan tanggung jawab sebagai pemilih. Menurut penelitian oleh Setiawan (2021), pendidikan politik yang efektif dapat meningkatkan partisipasi politik di kalangan pemilih muda.³ Namun, kendala dalam implementasi program ini, seperti keterbatasan anggaran dan tenaga pengajar yang kompeten, sering kali menjadi penghambat. Selain itu, tingginya distraksi informasi di media sosial juga dapat mengganggu upaya untuk menjangkau pemilih pemula secara efektif.

Di tengah tantangan ini, pemikiran Islam tentang keadilan dapat menjadi landasan yang berharga untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Keadilan, dalam perspektif Islam, bukan hanya sekadar prinsip moral, melainkan juga mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu. Dalam Al-Qur'an, keadilan diamanatkan sebagai nilai fundamental yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam

¹ KPU. (2023). Statistik Pemilih Pemula dalam Pemilu. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

² Yunus, A., Tamma, S., & Ekawaty, D. (2022). Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota

Makassar. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 65-80.

³ Setiawan, A. (2021). Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilih Muda di Era Digital. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 14(3), 112-130.

berpolitik. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Q. S. An-Nisa: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁴

Dengan memahami keadilan dari sudut pandang Islam, diharapkan pemilih pemula dapat menyadari pentingnya peran Pemilih Pemula dalam menjaga integritas pemilu dan mendorong perubahan positif di masyarakat.

Penerapan prinsip keadilan dalam pengawasan pemilu juga dapat memperkuat kesadaran politik pemilih pemula. Dengan meningkatkan kesadaran politik, pemilih pemula tidak hanya berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga menjadi pengawas aktif dalam proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Murtadho (2022) yang

menyatakan bahwa kesadaran politik yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam pengawasan pemilu.⁵ Dengan demikian, Pemilih Pemula dapat menjadi agen perubahan yang responsif terhadap isu-isu sosial dan politik di sekitarnya.

Penelitian ini sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana pemikiran Islam mengenai keadilan dapat diterapkan dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai keadilan, yang dapat diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia.

Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam menegakkan demokrasi. Sebagai proses politik yang melibatkan partisipasi publik secara luas, pemilu menjadi instrumen penting bagi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemimpin yang mereka percayai. Pemilu yang dilaksanakan secara berkala memberikan

⁴ Kementerian Agama. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

⁵ Murtadho, M. (2022). Kesadaran Politik Pemilih Muda: Tantangan dan Solusi. Jurnal Kebijakan Publik, 15(2), 65-78.

kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi (Pratama, 2022). Namun, partisipasi ini harus diiringi dengan kesadaran politik yang memadai, terutama bagi pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih.

Pemilih pemula sering kali menjadi segmen yang kurang terpapar pendidikan politik yang memadai, sehingga kesadaran politik mereka cenderung rendah. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 30% pemilih dalam pemilu sebelumnya adalah pemilih pemula, dan jumlah ini sangat signifikan. Meskipun pemilih pemula memiliki potensi besar untuk memengaruhi hasil pemilu, studi menunjukkan bahwa partisipasi politik mereka masih rendah. Rendahnya kesadaran politik di kalangan pemilih pemula disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pendidikan formal di sekolah belum secara optimal mempersiapkan pemilih pemula dalam menghadapi realitas politik yang kompleks (Setiawan, 2021).

Lingkungan sosial dan keluarga juga berperan dalam membentuk pemahaman politik pemilih pemula. Hasil temuan Komisi Pemilihan Umum, bahwa keluarga yang aktif membahas isu-isu politik cenderung menghasilkan anak-anak yang lebih terlibat dalam pemilu. Namun,

kenyataannya, banyak pemilih pemula yang tidak memiliki akses ke diskusi politik yang konstruktif di rumah. Selain itu, media sosial berfungsi sebagai sumber utama informasi politik bagi generasi muda. Sayangnya, platform ini sering kali dipenuhi dengan informasi yang tidak akurat atau bias, yang dapat membingungkan pemilih pemula. Survei oleh Digital Media Research Institute (2023) menunjukkan bahwa sekitar 60% generasi muda mendapatkan informasi politik mereka dari media sosial, yang menjadi sarana penyebaran hoaks.

Tantangan ini semakin rumit dengan maraknya penyebaran informasi yang tidak benar, seperti hoaks, di media sosial. Informasi yang menyesatkan ini dapat mengaburkan pemahaman pemilih pemula mengenai isu-isu politik yang penting, sehingga mereka tidak dapat membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab dalam pemilu. Dengan demikian, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal.

Pengawasan pemilu merupakan elemen penting yang dapat memperkuat proses demokrasi dan kesadaran politik. Pengawasan yang efektif tidak hanya memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya

pemilih pemula, terhadap hasil pemilu. Menurut Wahyu (2022) keterlibatan pemilih pemula dalam pengawasan pemilu dapat menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mereka tentang pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses politik.⁶

Keterlibatan pemilih pemula dalam pengawasan pemilu dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem politik. Hal ini akan membantu mereka menyadari bahwa partisipasi dalam pengawasan adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Dengan menjadi pengawas aktif, pemilih pemula akan lebih memahami bagaimana sistem politik bekerja dan mengapa penting bagi mereka untuk berpartisipasi dalam menjaga integritas pemilu.

Dalam konteks Islam, keadilan adalah nilai fundamental yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik dan pemilu. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar setiap individu dan kelompok menegakkan keadilan, yang harus tercermin dalam setiap tindakan mereka, termasuk dalam konteks pemilu..

Keadilan dalam Islam mencakup transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip keadilan ini dalam pemilu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat. Pemahaman yang mendalam tentang keadilan dalam Islam dapat menjadi solusi bagi rendahnya kesadaran politik di kalangan pemilih pemula. Melalui pengawasan pemilu yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, pemilih pemula diharapkan tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga aktif berkontribusi dalam menjaga demokrasi yang sehat.

Dalam konteks pemilu yang semakin kompleks di Indonesia, pemahaman mengenai keadilan dalam Islam dan pengawasan pemilu menjadi dua aspek penting yang patut diteliti. Penelitian ini dirancang untuk menggali dua masalah utama. Pertama, kami ingin menyelidiki pengaruh pemahaman tentang keadilan dalam Islam terhadap kesadaran politik pemilih pemula di Indonesia. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud mencakup pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang dapat memengaruhi sikap dan tindakan individu dalam ranah politik. Apakah pemahaman

⁶ Wahyu, H. (2022). *Pemilih Pemula dan Perubahan Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Masyarakat.

tersebut dapat memicu kesadaran politik yang lebih tinggi di kalangan pemilih pemula? Pertanyaan ini menjadi krusial mengingat generasi muda adalah agen perubahan yang dapat menentukan arah masa depan bangsa.

Masalah kedua yang diangkat adalah peran pengawasan pemilu dalam memperkuat kesadaran politik dan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Pengawasan pemilu yang efektif diyakini dapat memberikan jaminan keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan, sehingga mendorong pemilih, khususnya yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya, untuk lebih aktif berpartisipasi. Dalam konteks ini, penting untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pemilu dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran politik dan partisipasi pemilih pemula.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dua hal utama. Pertama, menganalisis pengaruh pemahaman tentang keadilan dalam Islam terhadap kesadaran politik pemilih pemula. Di sini, kami berharap dapat menemukan bukti yang menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan dalam Islam dapat berpengaruh positif terhadap sikap dan perilaku politik mereka. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana

pengawasan pemilu dapat memperkuat kesadaran politik dan partisipasi aktif pemilih pemula. Kami ingin memahami mekanisme di balik pengawasan pemilu yang efektif dan bagaimana hal itu dapat berkontribusi pada keterlibatan pemilih pemula dalam proses demokrasi.

Dengan menghasilkan rekomendasi berbasis temuan penelitian, diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pengambil kebijakan dalam merancang program pendidikan politik yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi yang berkecimpung dalam bidang pendidikan politik dan demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan penelitian ini dengan serius dan terencana, guna mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menjadikan keadilan sebagai landasan dalam pengawasan pemilu, kita dapat membangun masyarakat yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini mencakup dua poin. Pertama, kami berhipotesis bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang keadilan dalam Islam akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran politik pemilih pemula. Kedua, kami juga berhipotesis bahwa pengawasan pemilu yang efektif

akan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik pemilih pemula dalam proses demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang politik, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan generasi muda Indonesia.

KAJIAN TEORETIS

Pengertian Keadilan dalam Islam

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam, sangat ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pandangan Islam, keadilan mencakup berbagai aspek, termasuk hukum, moralitas, dan kesejahteraan sosial. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam ayat yang berbunyi: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan dengan adil" (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini menekankan bahwa keadilan bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga sebuah amanat yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, keadilan dalam Islam tidak terbatas pada penegakan hukum saja. Keadilan juga berkaitan erat dengan nilai moral dan etika. Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa keadilan harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, dan ini menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Para ulama seperti Ibn Khaldun dan Al-Mawardi menjelaskan pentingnya keadilan dalam konteks pemerintahan. Ibn Khaldun dalam karya terkenalnya, "Muqaddimah," mengungkapkan bahwa keadilan merupakan pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan berperan sentral dalam legitimasi dan keberlangsungan suatu pemerintahan.⁷

Selanjutnya, keadilan dalam pandangan Islam bukanlah sekadar konsep teoritis, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks pemerintahan, keadilan menjadi syarat utama bagi seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya. Mawardi menekankan bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan kepercayaan rakyat, yang pada gilirannya menciptakan stabilitas sosial dan politik.⁸ Oleh karena itu, keadilan harus menjadi landasan dalam

⁷ Ibn Khaldûn, I. (2015). *The muqaddimah: An introduction to history*-abridged Edition.

⁸ Mawardi, A. I. M. (2014). *Al-ahkam al-sultaniyah wa-al-wilayat al-diniyah*. Al-Hakawati.

setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Keadilan juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Dalam masyarakat, keadilan berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta menjaga keseimbangan sosial. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya ditujukan kepada pemilih pemula yang memiliki kekuasaan atau otoritas, tetapi juga kepada Pemilih Pemula yang terpinggirkan. Dalam konteks ini, Islam mendorong adanya perlindungan terhadap hak-hak kaum lemah dan tertindas, sehingga setiap individu merasa dihargai dan diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Lebih jauh, keadilan dalam Islam juga berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap tindakan yang diambil oleh individu atau pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan mengenai keadilan harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam semua aspek kehidupan.

Secara keseluruhan, keadilan dalam Islam adalah konsep yang holistik, mencakup hukum, moral, dan aspek sosial. Hal ini menjadi landasan penting bagi

terwujudnya masyarakat yang beradab, harmonis, dan sejahtera. Dalam konteks ini, keadilan juga menjadi pendorong bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, yang akan dibahas lebih lanjut pada sub pokok bahasan berikutnya.

Keadilan dan Partisipasi Politik

Keadilan dalam Islam juga mengandung makna penting terkait dengan partisipasi politik. Partisipasi politik dianggap sebagai tanggung jawab moral dan sosial setiap individu untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dapat diukur dari seberapa adilnya hukum yang ditegakkan, tetapi juga seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.⁹

Nabi Muhammad SAW memberikan contoh nyata tentang pentingnya partisipasi politik. Beliau mendorong umatnya untuk tidak hanya menjadi pengikut yang pasif, tetapi juga berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hadis yang menyiratkan pentingnya musyawarah dan konsultasi

⁹ Qaraḍāwī, Y. (2010). *Islamic awakening between rejection and extremism*. The Other Press.

dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, keadilan dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif, yang pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.

Sebagai bentuk partisipasi, keikutsertaan dalam pemilu dapat dilihat sebagai sebuah ibadah. Mawardi menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam pemilu bukan hanya sekadar hak, tetapi juga kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh setiap individu.¹⁰ Melalui pemilu, masyarakat dapat mengontrol kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh Islam. Oleh karena itu, pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai Islam menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan masyarakat.

Namun, partisipasi politik tidak selalu berjalan mulus. Dalam kenyataannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di kalangan pemilih pemula. Pemilih Pemula sering kali kurang memiliki informasi dan pemahaman yang cukup tentang proses pemilu dan hak-hak Pemilih

Pemula sebagai pemilih. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan politik yang komprehensif agar pemilih pemula dapat memahami peran pemilih pemula dalam demokrasi. Ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang sadar politik dan aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Melalui pendidikan politik, masyarakat tidak hanya diajarkan tentang proses pemilu, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Islam. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan pemilih yang aktif dan kritis, yang akan memperkuat demokrasi dan keadilan di Indonesia.¹¹

Dalam konteks ini, keadilan dan partisipasi politik saling berhubungan erat. Keputusan yang diambil tanpa melibatkan partisipasi masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses politik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Dengan cara ini,

¹⁰ Mawardi, A. I. M. (2014). *Al-ahkam al-sultaniyah wa-al-wilayat al-diniyah*. Al-Hakawati.

¹¹ Lady, C. (2023). *The Influence of Young Activist on Instagram and Twitter*

Towards Youth Political Participation in the 2024 Indonesia General Election: Study Case of Bandung City.

keadilan dapat ditegakkan dan masyarakat dapat merasa terlibat dalam setiap aspek pemerintahan.

Keadilan dalam Islam dan partisipasi politik merupakan dua sisi dari koin yang sama. Keadilan menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat, sementara partisipasi politik membutuhkan keadilan untuk memastikan bahwa suara setiap individu dihargai. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses demokrasi.

Pengawasan Pemilu

Pengawasan pemilu merupakan salah satu proses penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dapat merugikan pemilih. Dalam konteks ini, pengawasan pemilu menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan.

Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan selama pemilu. Dengan mengawasi semua

tahapan pemilu, Bawaslu dapat memastikan bahwa setiap suara dihargai dan tidak ada pemilih yang dirugikan. Pengawasan pemilu yang baik dapat mencegah terjadinya berbagai bentuk kecurangan, seperti politik uang, intimidasi terhadap pemilih, dan manipulasi suara. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, agar setiap individu mendapatkan haknya secara adil dan setara.

Pengawasan pemilu juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua aspek yang sangat penting. Bawaslu harus memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan transparan, sehingga masyarakat dapat melihat proses yang berlangsung. Dengan demikian, pengawasan pemilu menjadi sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada.

Lebih lanjut, pengawasan pemilu yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan Islam dapat memperkuat rasa aman di kalangan pemilih. Ketika masyarakat merasa bahwa proses pemilu diawasi secara ketat dan transparan, Pemilih Pemula akan lebih percaya untuk berpartisipasi. Ini akan berdampak positif pada tingkat partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda dan pemula. Pengawasan yang baik juga akan

mendorong masyarakat untuk menggunakan hak suara Pemilih Pemula dengan lebih aktif.

Namun, meskipun pengawasan pemilu memiliki peran penting, tantangan tetap ada. Dalam beberapa kasus, pengawasan pemilu dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Dalam hal ini, penting untuk memberikan dukungan kepada Bawaslu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanpa tekanan.

Dalam konteks ini, kesadaran masyarakat sangat penting. Masyarakat harus didorong untuk aktif mengawasi pemilu di tingkat lokal, misalnya melalui pemantauan independen. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pengawasan pemilu akan menjadi lebih efektif. Ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilu.

Pengawasan pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu. Dengan pengawasan yang baik, kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dapat meningkat, dan partisipasi masyarakat

dalam pemilu akan semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu ada upaya berkelanjutan untuk memperkuat pengawasan pemilu dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keadilan dalam proses demokrasi.

Kesadaran Politik Pemilih Pemula

Kesadaran politik pemilih pemula adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Pemilih pemula sering kali merupakan generasi yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilu. Oleh karena itu, Pemilih Pemula membutuhkan pemahaman yang baik tentang proses pemilu dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Pendidikan politik yang tepat dapat membantu Pemilih Pemula memahami hak dan kewajiban Pemilih Pemula sebagai pemilih, serta bagaimana cara memilih dengan bijak.

Preferensi politik pemilih pemula menurut Herlina dan Ansori (2024) dapat dilihat dari tiga ciri utamanya, yaitu (1) belum memiliki loyalitas yang kuat terhadap partai politik atau figur politik tertentu; (2) cenderung memilih berdasarkan isu-isu dan kandidat yang dianggap kompeten dan mewakili aspirasi mereka; dan (3) mudah terpengaruh oleh

informasi dan kampanye politik, terutama melalui media sosial.¹²

Dengan demikian, maka penting memberikan sosialisasi dan edukasi politik kepada pemilih pemula agar menjadi pemilih yang cerdas. Sehingga pendidikan politik di kalangan pemilih pemula ini harus dimulai sejak dini di sekolah atau madrasah. Hal ini sejalan dengan pendapat Ansori, dkk (2022) bahwa sekolah atau madrasah sebagai sarana atau wahana edukatif yang didalamnya berlangsung proses pembelajaran yang dilakukan antara siswa dengan guru untuk mempertinggi daya serap dan kemampuan penalarannya dalam proses pendidikan serta membantu memperluas cakrawala.¹³

Sekolah, keluarga, dan komunitas memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik anak-anak dan remaja. Melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dalam Islam, pemilih pemula dapat memahami pentingnya partisipasi politik dan tanggung jawab pemilih pemula dalam menjaga keadilan dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, pemilih pemula akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menggunakan hak suara pemilih pemula secara bijak.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi politik yang positif juga dapat meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Dalam kegiatan ini, pemilih pemula diajak untuk berdiskusi mengenai isu terkini dan pentingnya memilih calon yang memiliki integritas dan komitmen terhadap keadilan. Hal ini akan memberikan pemilih pemula perspektif yang lebih luas dan membantu pemilih pemula dalam membuat keputusan yang tepat saat memilih.

Namun, tantangan tetap ada. Pemilih pemula sering kali terpengaruh oleh informasi yang salah atau hoaks yang beredar di media sosial. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan yang kritis agar pemilih pemula dapat memilah informasi yang benar dan salah. Selain itu, pemilih pemula juga perlu diajarkan untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebaikan dalam memilih calon yang akan mewakili Pemilih Pemula di lembaga legislatif dan eksekutif.

Lebih jauh, kesadaran politik pemilih pemula dapat berdampak positif pada kualitas demokrasi. Dengan pemilih yang cerdas dan berpengetahuan, sistem pemilu akan berjalan lebih baik, dan pemimpin yang terpilih akan lebih

¹² Herlina, L. & Ansori, A. H. (2024). Pemilih Pemula Potensi dan Harapan. Pandeglang. Staisman Press. 3.

¹³ Ansori, A. H., Syihabudin, T., & Budi, A. (2022). Strategi Peningkatan Mutu

Madrasah Melalui Pengembangan Sumber Daya Guru di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Ta'dibiya, 2(1), 52.

representatif. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap individu memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan kepentingan pemilih pemula.¹⁴

Keterlibatan pemilih pemula dalam organisasi kepemudaan dan komunitas juga dapat meningkatkan kesadaran politik Pemilih Pemula. Melalui organisasi ini, Pemilih Pemula dapat berinteraksi dengan sesama pemilih dan mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai proses pemilu. Selain itu, Pemilih Pemula dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih adil dan demokratis.

Kesadaran politik pemilih pemula adalah kunci untuk menciptakan pemilih yang aktif dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan politik yang tepat, Pemilih Pemula dapat memahami nilai-nilai keadilan dalam Islam dan pentingnya partisipasi politik. Dengan pemilih yang cerdas, diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini disusun untuk memahami lebih dalam mengenai pemikiran Islam tentang keadilan dalam konteks pengawasan pemilu dan pengaruhnya terhadap kesadaran politik pemilih pemula. Mengingat pentingnya data yang representatif, penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai instrumen pengumpulan data.

Desain penelitian ini berfokus pada survei kuantitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang terukur dan dapat dianalisis secara statistik. Pendekatan ini dipilih karena dapat membantu dalam mengeksplorasi hubungan antara pemikiran Islam mengenai keadilan, pengawasan pemilu, dan kesadaran politik pemilih pemula. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan Islam dapat diaplikasikan dalam konteks politik dan pemilu.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pemilih pemula yang terdaftar untuk mengikuti pemilu di Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa berusia 17 hingga 25 tahun. Sampel penelitian ini diambil

¹⁴ Azhar, N. (2024). Analysis of the Understanding and Political Awareness of the New Voters in the 2024 Election: A Siyasah Dusturiyah Perspective. Analysis of the understanding and political awareness of new voters in the 2024 election: A siyasah

dusturiyah perspective24 Election: A Siyasah Dusturiyah Perspective. Analysis of the Understanding and Political Awareness of New Voters in the 2024 Election: A Siyasah Dusturiyah Perspective, 9(2), 224-244.

dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana peneliti memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu. Sampel yang diambil berjumlah 300 responden, yang dianggap cukup representatif untuk menggambarkan populasi pemilih pemula di Indonesia.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, yang terdiri dari tiga bagian utama. Bagian pertama mengumpulkan informasi demografi responden, termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status sebagai pemilih. Bagian kedua berfokus pada pemahaman responden tentang prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, yang didasarkan pada referensi dari Al-Quran dan Hadis. Sementara itu, bagian ketiga mengukur pengetahuan responden tentang proses pengawasan pemilu serta peran pemilih pemula sebagai pemilih. Kuesioner ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji coba yang melibatkan 30 responden di luar sampel penelitian, dengan hasil yang menunjukkan validitas konstruk yang memadai dan nilai reliabilitas sebesar 0.85.

Pengumpulan data direncanakan berlangsung dari bulan Agustus hingga September 2024. Untuk meningkatkan partisipasi, survei akan dilakukan secara online melalui platform *Google Forms*.

Sebelum responden mengisi kuesioner, Pemilih Pemula akan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian serta memastikan bahwa partisipasi Pemilih Pemula bersifat sukarela. Hal ini penting agar responden merasa nyaman dan tidak tertekan dalam memberikan jawaban.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Menurut Ansori (2021) Mengolah data yaitu membuat data ringkasan berdasarkan data mentah hasil pengumpulan data dengan menggunakan rumus tertentu, misalnya menghitung jumlah, rata-rata, proporsi (persentase), berbagai koefisien seperti koefisien variasi, koefisien korelasi, koefisien determinasi, koefisien regresi.¹⁵

Kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Proses analisis dimulai dengan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik demografi responden dan jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan dalam kuesioner. Selanjutnya, analisis regresi berganda akan diterapkan untuk menguji hubungan antara pemikiran Islam tentang keadilan, pengawasan pemilu, dan kesadaran politik pemilih pemula. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang

¹⁵ Ansori. A. H. (2021). Statistika Penelitian. Pandeglang. Staisman Press, 9.

mempengaruhi kesadaran politik di kalangan pemilih pemula.

Adapun batasan penelitian ini mencakup fokus yang hanya pada pemilih pemula di Indonesia, yang berarti bahwa hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selain itu, keterbatasan waktu dalam pengumpulan data dapat mempengaruhi representativitas sampel yang diambil.

Melalui metodologi yang sistematis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pemikiran Islam tentang keadilan dan peran pentingnya dalam pengawasan pemilu, serta dampaknya terhadap kesadaran politik pemilih pemula. Dengan pendekatan kuantitatif yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan pendidikan politik dan pengawasan pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pemahaman tentang Keadilan dalam Islam

Berdasarkan hasil survei kepada 300 responden bahwa terdapat 46 responden (15,3%) menyatakan memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Pemahaman ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung

jawab sosial. Responden yang memiliki pemahaman ini cenderung aktif dalam diskusi mengenai isu-isu politik dan pemilu. Menariknya, pemahaman keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek religius, tetapi juga mencakup konteks sosial dan politik yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebanyak 105 responden (35%) mengaku memiliki pemahaman yang sedang mengenai prinsip keadilan dalam Islam. Pemilih Pemula sering kali membutuhkan informasi tambahan untuk memahami bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam konteks politik. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan pemahaman di kalangan pemilih pemula agar Pemilih Pemula lebih siap untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pendidikan yang berbasis nilai-nilai keadilan dalam Islam dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan ini.

Sementara itu terdapat 149 responden (49,7%) lainnya menyatakan memiliki pemahaman yang rendah tentang prinsip keadilan dalam Islam. Pemilih Pemula cenderung tidak memahami sepenuhnya hak dan tanggung jawab Pemilih Pemula sebagai pemilih. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena pemilih yang tidak memahami hak-haknya berpotensi untuk tidak menggunakan hak suara Pemilih Pemula dengan bijak. Oleh

karena itu, penting untuk merancang program-program pendidikan yang dapat menjelaskan dengan jelas prinsip-prinsip keadilan ini kepada generasi muda.

Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dalam Islam harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman politik tetapi juga membentuk karakter pemilih yang bertanggung jawab. Keterlibatan dalam diskusi politik dan kegiatan sosialisasi lainnya dapat memperkuat pemahaman ini. Melihat proporsi pemahaman responden, sangat jelas bahwa pemahaman yang baik tentang keadilan dalam Islam dapat mendorong pemilih untuk lebih aktif berpartisipasi dalam politik. Responden yang merasa memiliki pemahaman yang baik lebih cenderung mengikuti berita politik dan terlibat dalam forum-forum diskusi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pemahaman agama dan keterlibatan sosial.

Hasil penelitian ini menegaskan akan pentingnya pendidikan agama dalam konteks modern. Pengetahuan tentang keadilan dalam Islam tidak hanya relevan dalam konteks spiritual tetapi juga dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, para pendidik dan pemangku kepentingan harus memperhatikan cara-

cara untuk menyampaikan nilai-nilai ini kepada generasi muda.

2. Kesadaran Politik

Hasil survei menunjukkan bahwa 65% responden menyatakan pentingnya menggunakan hak suara Pemilih Pemula dalam pemilu. Meskipun demikian, hanya 46% responden yang menyatakan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan tindakan. Banyak responden yang merasa penting untuk terlibat tetapi menghadapi hambatan dalam mewujudkannya.

Responden yang memiliki pemahaman yang baik tentang keadilan dalam Islam cenderung memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi. Pemilih Pemula lebih memahami konsekuensi dari tidak menggunakan hak suara Pemilih Pemula, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Keterlibatan ini dapat dilihat dari partisipasi pemilih pemula dalam diskusi politik dan kegiatan sosial yang berkaitan dengan pemilu.

Sebaliknya, responden yang kurang memahami keadilan dalam Islam menunjukkan tingkat kesadaran politik yang lebih rendah. Pemilih Pemula merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses pemilu, dan hal ini mengakibatkan pemilih pemula merasa apatis. Ketidapahaman ini bisa diatasi

melalui program-program pendidikan yang memberikan penjelasan tentang pentingnya partisipasi politik.

Hasil survei juga mengungkapkan bahwa 65% responden merasa bahwa kurangnya pengawasan yang efektif dalam pemilihan menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi pemilih pemula. Pemilih Pemula menginginkan transparansi dalam proses pemilihan agar bisa merasa lebih percaya untuk terlibat. Keterlibatan dalam pengawasan pemilu bisa meningkatkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi.

Ketidakpuasan terhadap pengawasan pemilu di antara responden menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Masyarakat, terutama pemilih pemula, perlu dilibatkan dalam kegiatan pengawasan agar Pemilih Pemula merasa menjadi bagian dari proses tersebut. Hal ini juga akan meningkatkan tingkat kepercayaan Pemilih Pemula terhadap hasil pemilu.

Meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula tidak hanya bergantung pada pemahaman pemilih pemula tentang keadilan dalam Islam, tetapi juga pada keterlibatan pemilih pemula dalam proses pengawasan. Ketika pemilih merasa bahwa suara pemilih pemula dihargai dan ada mekanisme untuk memastikan

akuntabilitas, pemilih pemula akan lebih termotivasi untuk terlibat.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik pemilih pemula sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan dan efektivitas pengawasan pemilu. Pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai ini harus menjadi fokus dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

3. Pengawasan Pemilu

Pengawasan pemilu merupakan aspek yang sangat penting dalam proses demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 15% responden merasa terlibat dalam kegiatan pengawasan pemilu. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam membangun budaya pengawasan yang melibatkan pemilih pemula. Kesadaran akan pentingnya pengawasan harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda dapat memahami perannya dalam proses demokrasi.

Responden yang terlibat dalam pengawasan pemilu melaporkan bahwa Pemilih Pemula merasa lebih bertanggung jawab terhadap hasil pemilu. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan Pemilih Pemula terhadap proses pemilu tetapi juga memperkuat rasa solidaritas di antara pemilih. Pemilih Pemula yang aktif dalam pengawasan cenderung berbagi informasi dan mengajak orang lain untuk

berpartisipasi. Di sisi lain bahwa terdapat banyak responden yang tidak terlibat dalam pengawasan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Pemilih Pemula merasa bahwa suara Pemilih Pemula tidak didengar dan tidak memiliki pengaruh terhadap hasil. Ini menimbulkan rasa frustrasi yang dapat mengakibatkan apatis terhadap pemilu.

Kelemahan dalam pengawasan pemilu juga diakui oleh berbagai lembaga pemantau. Banyak lembaga yang berfokus pada pemantauan hasil pemilu tetapi kurang melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan program yang melibatkan pemilih pemula dalam kegiatan pengawasan. Pengawasan yang melibatkan pemilih pemula dapat dilakukan melalui program pendidikan politik yang memperkenalkan pemilih pemula pada mekanisme pengawasan pemilu. Selain itu, pelatihan bagi pemilih pemula untuk menjadi pengawas pemilu dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam proses tersebut. Hal ini akan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Dengan melibatkan lebih banyak pemilih muda dalam proses pengawasan, kualitas

pengawasan dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dapat diperbaiki. Kemudian, partisipasi pemilih pemula dalam pengawasan pemilu harus didorong melalui sosialisasi yang efektif dan edukasi di tingkat komunitas. Ini dapat dilakukan dengan menggandeng organisasi pemuda dan lembaga pendidikan untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya pengawasan.

Pengawasan pemilu yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dalam konteks pemilih pemula, hal ini sangat penting untuk mendorong partisipasi pemilih pemula dalam pemilu dan memastikan suara pemilih pemula didengar. Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki pengawasan pemilu harus menjadi prioritas dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di Indonesia.

Pembahasan

1. Hubungan antara Pemahaman Keadilan dalam Islam dan Kesadaran Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pemahaman tentang keadilan dalam Islam dan kesadaran politik pemilih pemula. Pemahaman yang mendalam tentang keadilan membantu individu menyadari pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Dengan memahami

bahwa keadilan mencakup hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, pemilih pemula dapat lebih menghargai hak suara pemilih pemula.

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi faktor kunci. Pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dapat membantu membangun kesadaran politik di kalangan pemilih muda. Ketika pemilih pemula memahami bahwa keadilan adalah bagian dari ajaran agama, pemilih pemula akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam aktivitas politik.

Pendidikan tentang keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek spiritual tetapi juga menyentuh isu-isu sosial dan politik. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan tokoh agama dan pendidik dalam menyampaikan materi ini. Dengan cara ini, pemahaman keadilan dalam Islam dapat lebih mudah diterima dan diterapkan dalam konteks politik. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pendidikan yang baik tentang keadilan dapat mengubah cara pandang generasi muda terhadap politik. Masyarakat yang paham akan keadilan cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula melalui pendidikan.

Pengintegrasian nilai-nilai keadilan dalam kurikulum pendidikan dapat

menjadi langkah awal yang baik. Dengan memberikan pemahaman yang tepat, diharapkan pemilih pemula dapat memiliki kesadaran politik yang lebih baik. Kesadaran ini akan menjadi modal bagi pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam proses pemilu dan pengambilan keputusan politik. Keterkaitan antara pemahaman keadilan dalam Islam dan kesadaran politik harus dijadikan fokus dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Program pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan akan membantu membentuk generasi muda yang peduli terhadap isu-isu politik dan sosial. Penanaman nilai-nilai ini sebaiknya dimulai sejak dini dan berkelanjutan, sehingga diharapkan Pemilih Pemula dapat menjadi pemilih yang bertanggung jawab dan aktif.

2. Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula adalah kurangnya pemahaman tentang proses pemilu. Banyak pemilih muda yang tidak mengetahui cara untuk mendaftar atau mengetahui hak-hak mereka sebagai pemilih. Ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif mengenai proses dan tahapan pemilu. Faktor lainnya adalah ketidakpercayaan terhadap proses politik juga menjadi hambatan. Banyak responden

mengungkapkan rasa skeptis terhadap integritas pemilu atau pilkada. Oleh karena itu, transparansi dalam proses pemilu harus menjadi prioritas utama. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu dilakukan dengan jujur dan adil, pemilih pemula akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi.

Untuk itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Salah satunya adalah melalui penggunaan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Platform ini memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas. Dengan memanfaatkan media sosial, sosialisasi dan edukasi tentang pemilu dan pentingnya partisipasi dapat lebih mudah dijangkau oleh pemilih pemula. Begitu juga dengan masyarakat, perlu didorong untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Melalui pengawasan, pemilih pemula dapat merasakan keterlibatan langsung dalam proses demokrasi. Program sosialisasi dan edukasi tentang pengawasan pemilu dapat memberikan pemilih pemula pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang diperlukan.

Dengan demikian, maka untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, diperlukan pendekatan yang

komprehensif. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula dapat meningkat. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan.

Sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi sangat penting untuk dilibatkan dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula. Menurut Ansori, dkk. (2022) bahwa sekolah atau madrasah sebagai salah satu sarana atau wahana edukatif yang didalamnya berlangsung proses pembelajaran yang dilakukan antara siswa dengan guru untuk mempertinggi daya serap dan kemampuan penalarannya dalam proses pendidikan serta membantu memperluas cakrawala.¹⁶ Sehingga, sangat penting semua pihak untuk bersinergi menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pemilihan dan terus meningkatkan partisipasi pemilih.

3. Peran Media dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pemula

Media memiliki peranan yang penting dalam membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih yang aktif mengikuti berita melalui media cenderung lebih mendapatkan informasi dan lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu. Dengan

¹⁶ Ansori, A. H., Syihabudin, T., & Budi, A. (2022). Strategi Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Pengembangan Sumber

Daya Guru di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Ta'dibiya, 2(1), 52.

demikian, media harus berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat dan mendidik kepada masyarakat. Hal lain bahwa, media sosial semakin menjadi sumber informasi utama bagi generasi muda. Penggunaan platform ini untuk menyebarkan informasi tentang pemilu dan pentingnya partisipasi pemilih dalam pemilihan dapat menjadi strategi yang efektif. Namun, tantangan seperti penyebaran berita hoaks juga harus dihadapi, oleh karena itu edukasi tentang cara mengenali berita yang valid menjadi penting disampaikan kepada pemilih pemula.

Media juga dapat berkontribusi dalam menciptakan diskusi publik yang sehat. Dengan memberikan ruang bagi berbagai pandangan, media dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam isu-isu politik. Program *talkshow* dan forum diskusi yang melibatkan pemilih muda bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Kemudian media juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mengadakan kampanye kesadaran pemilih. Sosialisasi dan edukasi ini dapat menjangkau pemilih muda melalui kegiatan di sekolah dan perguruan tinggi. Dengan cara ini, informasi tentang

pemilihan dan pentingnya hak suara dapat disebarkan secara efektif.

Dengan memanfaatkan media secara optimal, diharapkan kesadaran politik pemilih pemula dapat meningkat. Masyarakat yang mendapatkan informasi dengan baik akan lebih aktif dalam mengikuti pemilu dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Selain itu, kolaborasi antara media, pendidikan, dan masyarakat sipil sangat penting. Hal ini selaras dengan pendapat Herlina dan Ansori (2024), bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan media massa sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dalam pendidikan politik dan literasi digital.¹⁷

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang keadilan dalam Islam berpengaruh positif terhadap kesadaran politik pemilih pemula. Pemilih yang memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip keadilan cenderung lebih aktif terlibat dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa berbagai faktor, seperti akses informasi, pendidikan politik, dan kepercayaan terhadap proses pemilu, memengaruhi

¹⁷ Herlina, L. & Ansori, A. H. (2024). *Pemilih Pemula Kunci Perubahan di Era Digital*. Pandeglang. Staisman Press. 83

tingkat partisipasi pemilih muda. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pendidikan, sosialisasi, dan peningkatan transparansi dalam proses pemilu.

Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai keadilan dalam kurikulum pendidikan sebagai langkah awal untuk membentuk kesadaran politik di kalangan pemilih pemula. Pendidikan yang berbasis pada nilai keadilan diharapkan dapat membantu menciptakan generasi muda yang lebih kritis, sadar akan hak-haknya, dan aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media, baik tradisional maupun sosial, memiliki peran signifikan dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mendorong partisipasi pemilih muda. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi politik.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih pemula. *Pertama*, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan mengenai keadilan dalam Islam serta proses pemilu

dalam kurikulum. Dengan cara ini, generasi muda akan dibekali pengetahuan yang relevan dan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak pemilih pemula sebagai pemilih, sehingga pemilih pemula lebih siap untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Kedua, media juga memiliki peran krusial dalam membangun kesadaran politik di kalangan pemilih muda. Meningkatkan penyebaran informasi yang berkualitas dan mendidik melalui program-program yang menarik dapat membantu menarik minat generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu-isu politik. Media sosial, sebagai platform yang banyak digunakan oleh pemilih muda, dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi mengenai pemilu dan mendorong keterlibatan Pemilih Pemula dalam pengawasan pemilu.

Ketiga, organisasi masyarakat sipil perlu melaksanakan program yang mendorong keterlibatan pemilih muda dalam isu-isu politik dan sosial. Forum diskusi dan kegiatan yang bersifat partisipatif dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan pendapat dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Edukasi tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu juga harus menjadi

fokus utama, agar kepercayaan publik terhadap sistem politik dapat terbangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, A. H. (2021). *Statistika Penelitian*. Pandeglang. Staisman Press.
- Ansori, A. H., Syihabudin, T., & Budi, A. (2022). *Strategi Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Pengembangan Sumber Daya Guru di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang*. Ta'dibiya, 2(1).
- Azhar, N. (2024). Analysis of the Understanding and Political Awareness of New Voters in the 2024 Election: A siyasah dusturiyah perspective. *Analysis of the Understanding and Political Awareness of New Voters in the 2024 Election: A Siyasah Dusturiyah Perspective*, 9(2).
- Herlina, L. & Ansori, A. H. (2024). *Pemilih Pemula Kunci Perubahan di Era Digital*. Pandeglang. Staisman Press.
- Herlina, L. & Ansori, A. H. (2024). *Pemilih Pemula Potensi dan Harapan*. Pandeglang. Staisman Press.
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khaldûn, I. (2015). *The muqaddimah: An introduction to history-abridged Edition*.
- KPU. (2023). *Statistik Pemilih Pemula dalam Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Lady, C. (2023). *The Influence of Young Activist on Instagram and Twitter Towards Youth Political Participation in the 2024 Indonesia General Election: Study Case of Bandung City*.
- Mawardi, A. I. M. (2014). *Al-ahkam al-sultaniyah wa-al-wilayat al-diniyah*. Al-Hakawati.
- Murtadho, M. (2022). Kesadaran Politik Pemilih Muda: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2).
- Qaradāwī, Y. (2010). *Islamic awakening between rejection and extremism*. The Other Press.
- Setiawan, A. (2021). Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilih Muda di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(3).
- Yunus, A., Tamma, S., & Ekawaty, D. (2022). Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*.